



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Sunkutabel, Kompeten,  
Harmonis,oyal, adaptif, kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**



# RENCANA KERJA

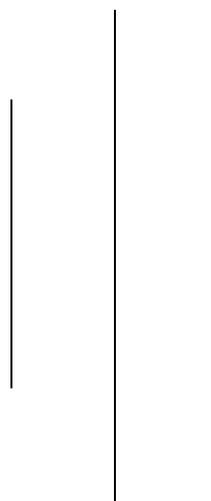
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2024



**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Juli 2024  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

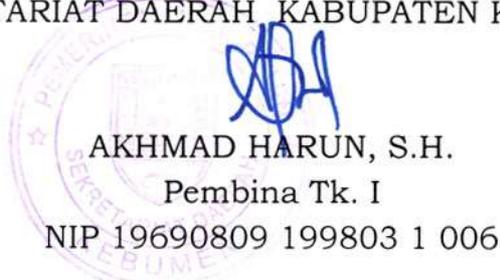
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

  
AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2023, sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai sesuai target perencanaan.

Penyusunan Renja merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah. Renja Setda pada Tahun 2024 menggunakan dokumen perencanaan awal Renstra Setda Tahun 2021-2026.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dan lebih baik.

Kebumen, 11 Juli 2024  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen,



**Edi Rianto, ST., MT.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701101 199803 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 .....</b>	<b>7</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Sekretariat Daerah .....	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	17
C. Capaian Keuangan .....	20
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah .....	24
E. Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Pemerintah Daerah .....	28
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>51</b>
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	51
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen .....	53
C. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah ...	53
D. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....	56
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>60</b>
A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten .....	60
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	60
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

### Lampiran

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 :	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	8
Tabel 2.2 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah s/d tahun 2023	13
Tabel 2.3 :	Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	18
Tabel 2.4 :	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	20
Tabel 2.5 :	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	30
Tabel 3.1 :	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	52
Tabel 3.2 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026	54
Tabel 3.3 :	Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	55
Tabel 3.4 :	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	57
Tabel 4.1 :	Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	60
Tabel 4.2 :	Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 SEKRETARIAT DAERAH
- Lampiran 2: Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2023 beserta lampirannya.
- Lampiran 3: Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2023
- Lampiran 4: Notulen Forum Perangkat Daerah 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004) yang kemudian dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang lebih memantapkan kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan apabila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Keluarnya aturan tersebut, juga menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain adalah: Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dalam system pemerintahan daerah. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat, maka teknis penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusunan rencana juga mengalami perubahan untuk menerapkan Sistem Perencanaan Partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagai usaha yang sistematis, maka pembangunan daerah harus dimulai melalui proses perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan daerah secara lebih tepat dan terarah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Agar dalam implementasinya perencanaan pembangunan pada tingkat level Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada dokumen pendukungnya setiap tahunnya. Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Memperhatikan hal tersebut, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan, tidak terkecuali penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

## **B. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendapatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renja meliputi :

1. Sinkronisasi terhadap program-program dalam Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan.
2. Menjabarkan pelaksanaan Rencana Strategis Setda Tahun 2016-2024
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan sebagai tindaklanjut dari permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya sebagai antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan untuk menyamakan persepsi, komitmen dan langkah-langkah kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi maupun nasional.

### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023  
Berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Review Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
Terdiri dari Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP
- LAMPIRAN - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah  
.  
- Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025  
- Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah Tahun 2025  
- Notulen Forum Perangkat Daerah Tahun 2025  
- Foto Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Kegiatan review hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Sekretariat Daerah Tahun 2023. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 pada dasarnya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Didalam review ini secara jelas tergambar terkait realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Tahun 2023 menjalankan 3 Program , 18 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2023**

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				9	Penyediaan Bahan/Material
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	11	Pengadaan Mebel
				12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				13	Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
			Daerah		Gedung Kantaor atau Bangunan Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	15			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	16			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	17			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	19			Pemeliharaan Mebel	
	20			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	21			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	23			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	24			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	25			Penyediaan Dana	

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		
		8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
				27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
		9	Penataan Organisasi	28	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
				29	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
				30	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
		10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	31	Fasilitasi Keprotokolan		
				32	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
				33	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
		2	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	11	Administrasi Tata Pemerintahan	34	Penataan Administrasi Pemerintahan
						35	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
						36	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
				12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	37	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait						

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Kesejahteraan Sosial
				39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
				40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				41	Fasilitasi Bantuan Hukum
		13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	42	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		14	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	43	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		<b>3</b>	<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
45	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			46	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				47	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			48	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				49	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				50	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	51	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	52			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
	53			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Realisasi dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
<b>1.</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
<b>4 01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</b>	<b>3,29</b>	<b>2,61</b>	<b>2,78</b>	<b>3,27</b>	<b>117,63</b>	<b>2.95</b>	<b>3,27</b>	<b>99,39</b>
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	15	3	3	11	366,67	3	17	113
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	75	15	3	3	100	15	33	44
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	15	3	5	12	240	3	18	120
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	25	5	15	15	100	5	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Nilai IKM Setda</b>	<b>86</b>	<b>88,78</b>	<b>84</b>	<b>89,57</b>	<b>106,63</b>	<b>85</b>	<b>89,57</b>	<b>104</b>
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	60	9	12	12	100	12	33	55
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	60	9	12	12	100	12	33	55
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	256	0	64	64	100	64	128	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	9	12	12	100	12	33	55
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	635	62	127	127	100	127	316	49
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12	12	12	12	100	12	12	100
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	20	2	4	4	100	4	10	50
4 01 01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan	40	4	8	8	100	8	20	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.14	Pimpinan	Komunikasi Pimpinan								
<b>4 01 03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>106,67</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	15	1	3	4	133,33	3	8	53
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2	1	2	2	100	2	5	250
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui LPSE	50	1	10	11	110	10	22	44
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	20	1	4	5	125	4	10	50

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sementara itu Fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
5. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
6. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
7. Pelaksanaan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 - 2026**

No	Indikator	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,00	85,00	85,50	86,00	89,57	89,17	85,50	86,00	Tercapai
2.	Tingkat Kemiskinan	%	15,00 – 16,00	14,00- 15,00	13,50 – 14,00	13,00 – 13,50%	16,34	15,71	13,50 – 14,00	13,50 – 14,00	Belum Tercapai
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,66	NA	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	Tercapai
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	WTP	WTP	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil survei kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 dengan capaian Sangat Baik, namun demikian masih perlu perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya belum maksimal, rincian unsur pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat setda sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Unsur</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kinerja UPP</b>
1	Persyaratan	89,27	Sangat Baik
2	Prosedur	90,04	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	88,19	Baik
4	Biaya/Tarif	91,79	Sangat Baik
5	Produk Layanan	89,52	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,26	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,20	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,78	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	95,21	Sangat Baik
	<b>IKM Setda</b>	<b>89,57</b>	<b>Sangat Baik</b>

### C. Capaian Keuangan

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 57.131.754.729,00 dan anggaran sebesar Rp. 59.089.486.000,00 atau mencapai 96.69%. Rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2023**

<b>URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN T.A. 2023</b>	<b>REALISASI T.A. 2023</b>	<b>%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>33.648.591.000</b>	<b>32.548.265.115</b>	<b>96.69</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	19.491.495.000	18.998.588.558	97.47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.340.497.000	18.852.245.324	97.48
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.998.000	146.343.234	96.92
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	545.650.000	541.740.950	99.28
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.000.000	22.236.800	96.68
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	522.650.000	519.504.150	99.40
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	3.351.930.000	3.320.972.741	99.08
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	177.680.000	177.670.000	99.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000.000	1.499.312.650	99.95
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	81.700.000	79.912.500	97.81
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.150.000	20.390.000	92.05
Penyediaan bahan/material	64.720.000	64.501.700	99.66
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.505.680.000	1.479.185.891	98.24
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.053.086.000</b>	<b>1.000.606.750</b>	<b>95.02</b>

Pengadaan Mebel	76.467.000	68.037.750	88.98
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	194.929.000	184.440.000	94.62
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	781.690.000	748.129.000	95.71
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>2.180.919.000</b>	<b>2.050.764.337</b>	<b>94.03</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000	4.940.500	95.01
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	934.000.000	853.425.650	91.37
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.423.000	76.930.355	83.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.149.296.000	1.115.467.832	97.06
<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.510.340.000</b>	<b>4.287.746.345</b>	<b>95.06</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	1.367.962.000	1.322.633.262	96.69
Pemeliharaan Mebel	62.952.000	62.018.000	98.52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.720.000	24.536.000	99.26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.054.706.000	2.878.559.083	94.23
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.147.194.000</b>	<b>1.019.056.641</b>	<b>88.83</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000	174.976.641	57.86
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	205.000.000	204.995.000	100
Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.000	4.800.000	100

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	635.000.000	634.285.000	99.89
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>883.645.000</b>	<b>860.286.492</b>	<b>97.36</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	677.419.000	655.170.739	96.72
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	206.226.000	205.115.753	99.46
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>336.400.000</b>	<b>332.702.777</b>	<b>98.90</b>
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120.000.000	118.782.436	98.99
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120.000.000	119.334.487	99.45
Peningkatan Kinerja dan Reformasi	96.400.000	94.585.854	98.12
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>670.582.000</b>	<b>655.303.674</b>	<b>97.72</b>
Fasilitas Keprotokolan	379.816.000	376.176.732	99.04
Fasilitas Komunikasi Pimpinan	139.599.000	133.562.335	95.68
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	151.167.000	145.564.607	96.29
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>23.444.762.000</b>	<b>22.667.281.813</b>	<b>96.68</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.303.210.000</b>	<b>1.324.921.195</b>	<b>99.76</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	76.460.000	76.145.269	99.59
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.490.000	62.982.725	99.20
Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.163.260.000	1.160.984.559	99.80
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>21.675.295.000</b>	<b>20.953.862.980</b>	<b>96.67</b>
Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.582.295.000	19.963.090.230	96.99
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	379.400.000	368.935.650	97.24
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian	713.600.000	621.837.100	87.14

Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>441.277.000</b>	<b>388.497.638</b>	<b>88.04</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	57.560.000	57.223.993	99.42
Fasilitasi Bantuan Hukum	309.447.000	257.522.441	83.22
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	74.270.000	73.751.204	99.30
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>24.980.000</b>	<b>24.808.642</b>	<b>99.31</b>
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	24.980.000	24.808.642	99.31
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1.996.133.000</b>	<b>1.916.207.801</b>	<b>96.00</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>175.480.000</b>	<b>174.269.981</b>	<b>99.31</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.880.000	120.722.190	99.05
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.600.000	53.547.791	99.90
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>200.260.000</b>	<b>198.337.920</b>	<b>99.04</b>
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.100.000	86.266.836	99.04
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	113.160.000	112.071.084	99.04
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>767.060.000</b>	<b>701.465.017</b>	<b>91.45</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	524.750.000	461.311.751	87.91
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.330.000	63.605.321	97.36
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	176.980.000	176.547.945	99.38
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>330.683.000</b>	<b>322.630.733</b>	<b>97.56</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	294.149.000	288.801.751	98.18

Perikanan			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.368.000	5.306.163	98.85
Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air	31.166.000	28.522.819	91.52
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>59.089.486.000</b>	<b>57.131.754.729</b>	<b>96.69</b>

#### **D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**

Output Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sudah berjalan optimal. Titik tekan pada aspek koordinasi sudah tercermin dalam tugas fungsi dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana terjabarkan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan
  - a. Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Kurangnya sosialisasi regulasi kerjasama antar daerah sehingga terjadi ketidakefektifan pelaksanaan kerjasama daerah;
  - c. Perlunya dilakukan susur batas daerah dalam rangka pembenahan batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten sekitar;
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - a. Belum semua kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terfasilitasi terutama kegiatan di Luar Kota;
  - b. Kurang lengkap/belum optimalnya bahan-bahan sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh OPD, sehingga berakibat pada belum optimalnya kualitas materi sambutan;
  - c. Kurangnya pengetahuan PNS yang menangani keprotokolan di setiap unit kerja/Desa dan Kelurahan, yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pimpinan;
  - d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan prasarana dokumentasi.

3. Bagian Hukum
  - a. Masih terdapat rancangan Produk Hukum Daerah yang belum sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belum optimalnya analisis kebutuhan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - c. Terdapatnya Produk Hukum Daerah yang sudah tidak harmonis dan sinkron terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - e. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan;
  - f. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum merata pada semua kecamatan di Kabupaten Kebumen;
  - g. Penghimpunan data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Perangkat Daerah belum optimal baik dari aspek waktu maupun substansi;
  - h. Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah belum optimal;
4. Bagian Perekonomian dan SDA
  - a. Belum seluruh BUMD menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang memadai;
  - b. Belum seluruh BUMD telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
  - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, mengatur bahwa proses pengadaan Barang/Jasa BUMD tidak berpedoman pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun diatur tersendiri dengan peraturan BUMD;
  - d. Masih kurangnya jumlah SDM pengelola BUMD yang memahami/memiliki skill dan *knowledge* tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Belum seluruh pengurus dan Pengelola BUMD memahami tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - f. Masih terbatasnya ASN di Kabupaten Kebumen yang memiliki sertifikasi kompetensi pengawas BUMD
  - g. Kebutuhan modal BUMD yang dinamis disesuaikan dengan perkembangan usaha dan regulasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - h. Perlunya optimalisasi pemanfaatan pengelolaan dana CSR BUMD guna mendukung pembangunan daerah;
  - i. Perubahan puskesmas di Kabupaten Kebumen sebagai BLUD membutuhkan penyesuaian sistem manajemen manajemen, sistem akuntansi dan keuangan;
  - j. Revolusi industri 4.0 dan legilitas perlu penguatan sistem teknologi dan informasi pada BUMD;
  - k. Masih Perlunya Peningkatan pengawasan terhadap barang bersubsidi seperti LPG 3 KG dan Pupuk.
5. Bagian Administrasi Pembangunan
  - a. Belum maksimalnya OPD dalam pengawasan dan Pengendalian

- Kegiatan yang melibatkan bagian Administrasi Pembangunan dengan sesuai aturan;
- b. OPD dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan sering kali tidak lengkap;
  - c. Monitoring pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan seluruhnya mengingat terbatasnya personil dibanding dengan banyaknya jumlah paket pekerjaan se-Kabupaten
  - d. Terbatasnya SDM teknis dalam pengawasan dan Pengendalian Kegiatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a. Perlunya peningkatan sinergitas komunikasi ulama dan umaro secara intern dan antar umat beragama untuk mengantisipasi potensi konflik;
  - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bansos;
  - c. Perlunya peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ secara menyeluruh;
  - d. Belum akuratnya data tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
  - e. Perlunya perhatian terhadap marbot tempat ibadah;
  - f. Masih kurangnya dukungan Sekretariat UKS tingkat kecamatan dalam mendukung pembinaan lomba sekolah sehat;
  - g. Kurangnya pembinaan dan fasilitas terhadap lansia;
  - h. Belum optimalnya pendataan FKK OTA terhadap data anak asuh;
  - i. Belum adanya pembinaan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - j. Kurangnya pembinaan/Fasilitasi terhadap guru PAUD/ra di Kabupaten Kebumen.
7. Bagian Organisasi
- a. Masih perlunya dilakukan analisis penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah sehubungan dengan adanya regulasi baik yang baru diterbitkan setelah kelembagaan perangkat daerah terbentuk maupun hasil evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi daerah;
  - b. Belum ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - c. Belum dilaksanakan Analisis Beban Kerja secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar menetapkan jumlah dan kompetensi aparatur yang dibutuhkan pada setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - d. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik;
  - e. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi/survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang

- dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. Belum terpolanya sistem ketatalaksanaan (*business process*), karena belum semua proses penyelenggaraan tugas ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten belum meningkat secara signifikan;
  - h. Masih diperlukannya peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), baik LKjIP Kabupaten maupun LKjIP Perangkat Daerah;
  - i. Belum optimalnya upaya penguatan perangkat kerja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- a. Dokumen permohonan tender dari OPD seringkali belum sesuai dengan persyaratan sehingga menghambat proses pengadaan barang/jasa;
  - b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga fungsional pengadaan baik sebagai pokja pemilihan maupun sebagai pejabat pengadaan;
  - c. Kurangnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional pengadaan.
9. Bagian Umum
- a. Belum optimalnya kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
  - c. Belum seimbangny dukungan kualitas dan kuantitas SDM dengan tuntutan pelayanan yang dibutuhkan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah terdiri dari factor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memiliki kecakapan dan keahlian yang sesuai untuk memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan (terkadang) tumpang tindih tuntutan kinerja dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan oleh

Pemerintah Pusat yang terlalu cepat serta tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda- beda.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki posisi strategis karena memiliki fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pelaksanaan tugas SKPD; proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur ASN pada instansi daerah; serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah.

Dari berbagai permasalahan dari masing-masing Bagian dapat disimpulkan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinergitas Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Mewujudkan *Good Government*;
2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi dan Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan;
3. Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Sekretariat Daerah Sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
4. Masih perlunya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terkait Pemahaman dan Implementasi Terhadap Tugas dan Fungsi;
5. Belum optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas.

#### **E. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua

rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumberdaya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun review Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dientri dalam SIPD RI dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>49.116.347.505</b>					<b>60.094.760.505</b>	
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Nilai IKM Setda	<b>86,00 Nilai</b>	<b>34.077.766.505</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Nilai IKM Setda	<b>86,00 Nilai</b>	<b>35.281.784.505</b>	Penye suaian anggaran	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>24.155.595.505</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>24.053.067.505</b>	Penye suaian anggaran	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	23.860.614.505	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	23.860.614.505	sesuai	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi		Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Dokumen	294.981.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi		Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Dokumen	192.453.000	Penye suaian	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan SKPD		dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD			Keuangan SKPD		dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD			anggaran
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>273.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>278.000.000</b>	<b>Penyesuaian anggaran</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	23.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	28.000.000	Penyesuaian anggaran
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1600 Orang	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1600 Orang	250.000.000	sesuai
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.122.470.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.396.098.000</b>	<b>Penyesuaian anggaran</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	107.680.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	992.098.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.242.098.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	62.522.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	25.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	20.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	34.720.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	34.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	900.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	950.000.000	Penyesuaian anggaran
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>64 Unit</b>	<b>212.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>64 Unit</b>	<b>575.000.000</b>	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	62.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	62.000.000	<b>sesuai</b>
	Pengadaan		Jumlah Unit	4 Unit	90.000.000	Pengadaan		Jumlah Unit	4 Unit	453.000.000	Penye

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			suai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	sesuai
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.172.008.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.799.599.000</b>	Penyeuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Penyeuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	721.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	1.200.000.000	Penyeuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			ran
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.603.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.603.000	sesuai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.389.405.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.533.996.000	Penye suaian anggar an
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>127 Unit</b>	<b>2.396.716.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>127 Unit</b>	<b>2.396.716.000</b>	Penye suaian anggar an

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	969.676.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	942.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	124.720.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	124.720.000	sesuai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	64.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	64.720.000	sesuai
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.237.600.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.237.600.000	sesuai
	<b>Administrasi Keuangan dan</b>	<b>Bag. Umum</b>		12 Bulan	<b>1.087.194.000</b>	<b>Administrasi Keuangan dan</b>	<b>Bag. Umum</b>		12 Bulan	<b>1.142.194.000</b>	Penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>					<b>Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>					n anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	302.394.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	302.394.000	sesuai
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	145.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala	8 Orang	4.800.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala	8 Orang	4.800.000	sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang/ Bulan	635.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang/ Bulan	635.000.000	sesuai
	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>926.451.000</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan</b>	<b>Bag. Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>777.500.000</b>	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	693.926.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	587.500.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Kebutuhan		Jumlah Paket Kebutuhan	12 Paket	232.525.000	Penyediaan Kebutuhan		Jumlah Paket Kebutuhan	12 Paket	190.000.000	Penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			n anggaran
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Bag. Organisasi</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>323.518.000</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Bag. Organisasi</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>319.000.000</b>	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	100.608.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	143.461.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	140.000.000	Penyesuaian anggaran
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	1 Dokumen	79.449.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	1 Dokumen	79.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Reformasi Birokrasi					Reformasi Birokrasi			ran
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Bag. Prokopim</b>		<b>8 Layanan</b>	<b>408.814.000</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Bag. Prokopim</b>		<b>8 Layanan</b>	<b>572.286.000</b>	Penyeuaian anggaran
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	129.616.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	369.984.000	Penyeuaian anggaran
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	139.599.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	139.599.000	sesuai
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	139.599.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	62.703.000	sesuai
<b>2.</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>3,29 nilai</b>	<b>13.305.752.000</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>3,29 nilai</b>	<b>23.167.393.000</b>	Penyeuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah (EKPPD)					Daerah (EKPPD)			
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Bag. Pemerintahan</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>390.520.000</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Bag. Pemerintahan</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>424.059.000</b>	Penyesuaian anggaran
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	71.440.000	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	69.440.000	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	68.845.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	68.845.000	sesuai
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	250.235.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	285.774.000	Penyesuaian anggaran
	<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	<b>Bag. Kesra</b>		<b>15 Kegiatan</b>	<b>12.354.716.000</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	<b>Bag. Kesra</b>		<b>15 Kegiatan</b>	<b>22.232.261.000</b>	Penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Kesejahteraan Rakyat</b>					<b>Kesejahteraan Rakyat</b>					n anggaran
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	10.856.116.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	19.323.661.000	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	7 Dokumen	485.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	7 Dokumen	585.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	4 Dokumen	1.013.600.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	4 Dokumen	2.323.600.000	Penyeuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Bag. Hukum</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>500.415.000</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Bag. Hukum</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>458.972.000</b>	Penye suaian anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	80.000.000	sesuai
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	310.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	286.057.000	Penye suaian anggaran
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	110.415.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	92.915.000	Penye suaian anggaran
	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Bag.</b>		<b>5</b>	<b>60.101.000</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Bag.</b>		<b>5</b>	<b>52.101.000</b>	Penye

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintahan		Dokumen			Pemerintahan		Dokumen		suai anggaran
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	60.101.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	52.101.000	Penyesuaian anggaran
3.	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan</b>	<b>91,00%</b>	<b>1.732.829.000</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan</b>	<b>91,00%</b>	<b>1.645.583.000</b>	Penyesuaian anggaran
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>175.480.000</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>175.480.000</b>	sesuai
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	2 Dokumen	121.880.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	2 Dokumen	121.880.000	sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BLUD		BUMD dan BLUD			BLUD		BUMD dan BLUD			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	53.600.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	53.600.000	sesuai
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Bag. Adm. Pembangunan</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>246.107.000</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Bag. Adm. Pembangunan</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>195.340.000</b>	Penyesuaian anggaran
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	71.755.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	55.875.000	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	174.352.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	139.465.000	Penyesuaian anggaran
	<b>Pengelolaan</b>	<b>Bag. PBJ</b>		<b>10</b>	<b>929.847.000</b>	<b>Pengelolaan</b>	<b>Bag. PBJ</b>		<b>10</b>	<b>919.000.000</b>	Penye

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>Dokumen</b>		<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>Dokumen</b>		suaian anggaran
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	689.190.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	560.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	63.677.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	63.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	176.980.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1000 Orang	296.000.000	Penyesuaian anggaran
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya</b>	<b>Bag. Perekono</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>381.395.000</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya</b>	<b>Bag. Perekono</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>355.763.000</b>	Penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Alam</b>	<b>mian dan SDA</b>				<b>Alam</b>	<b>mian dan SDA</b>				n anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	336.854.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	336.854.000	sesuai
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	5.358.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	5.358.000	sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hidup		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			Hidup		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	39.183.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	13.551.000	Penyesuaian anggaran

Anggaran Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 60.094.760.505 yang terbagi dalam 1 urusan yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2025, Setda memiliki 3 program. Dari proporsi anggaran dari ketiga program tersebut anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah yang terbesar karena didalamnya terdapat anggaran untuk Gaji ASN. Sedangkan pada program pemerintah dan kesejahteraan rakyat terdapat bantuan Hibah dan Bansos.

Hasil Forum OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Forum perangkat daerah sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Evaluasi kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 capaian fisik 98,95% dan keuangan 96,69%. Dimana ada beberapa kegiatan yang belum tercapai diantaranya karena factor eksternal terkait bansos dan hibah pada Bagian Kesra.
3. Capaian kinerja Setda dibawah koordinator Asisten 1 terdapat beberapa yang masih dibawah target seperti tingkat kemiskinan dengan capaian 97,8%, harapan lama sekolah 98,02%, indeks Pembangunan gender 99,9%. Untuk capaian kinerja dibawah koordinator Asisten 2 pada tingkat Pembangunan terbuka telah sesuai target tetapi pada sektor PDRB primer, sekunder dan tersier BPS belum merilis pada saat Forum OPD Setda, serta capaian kinerja dibawah koordinator Asisten 3 yang masih rendah ada di nilai SAKIP yaitu baru 95,8%.
4. Pada perencanaan awal tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan adanya kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KIE, Taman lingkungan Setda dan Peralatan untuk dokumentasi pada Bagian Protoko dan Komunikasi Pimpinan.
5. Saran masukan dari narasumber secara garis besar adalah:
  - a. bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai kajian harus main strategi teori kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan bukan memperbanyak program, tetapi bagaimana cara menempatkan saran untuk mengurangi jaring-jaring kemiskinan.
  - b. Melihat Kembali kesuaian antara RKPD dengan RPJMD, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, untuk itu Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengoptimalkan sesuai tugas dan fungsinya agar nilai SAKIP segera tercapai sesuai target.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi**

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai Tahun 2016, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait urusan perencanaan berubah dari kewenangan urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan perencanaan. Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk kelembagaan Sekretariat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional tertuang dalam Nawa Cita, di antaranya :

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia;
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 termasuk didalamnya Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja tersebut merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Selain memperhatikan telaah kebijakan nasional, penyusunan Rencana Kerja juga memperhatikan telaah terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Telaah kebijakan yang dimaksud terkait dengan penyelarasan terhadap arah pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025 yang diarahkan pada upaya pencapaian sasaran tahap IV RPJPD, yaitu pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar yang semakin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondusivitas wilayah yang mantap, serta kemampuan iptek yang meningkat. Selain itu ada arah kebijakan dan strategi yang didalamnya tercakup visi misi Kab. Kebumen.

**Tabel. 3.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

<b>Visi</b>	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat	
<b>Misi 1</b>	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi	
<b>Tujuan</b>	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik	1. Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
		2. Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
		3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan
		5. Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
		6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan

		7. Meningkatkan kualitas pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa
--	--	---

## B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati Kebumen adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat.

## C. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati di Sekretariat Daerah Kebumen adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
- d. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim
- e. Peningkatan kondsivitas wilayah dan ketahanan bencana

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen bertujuan memberi gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah di Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83	84	85	85,5	86	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83	84	85	85,5	86	



#### **D. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025**

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada. Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2024 mencakup 3 program dengan 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2025**

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	<b>1 Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)</b> 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	<b>2 Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan)</b> 4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	<b>3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum)</b> 5. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 6. Fasilitasi Bantuan Hukum 7. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	<b>4 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra)</b> 8. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 9. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	<b>5 Administrasi Pembangunan (Bagian Adminsitrasi Pembangunan)</b> 11. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	<b>6 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian ( Bagian Perekonomian&amp;SDA )</b> 13. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 14. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	<b>7 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam ( Bagian Perekonomian&amp;SDA )</b> 15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 16. Koordinasii, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 17. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
<b>8 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)</b>	

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 19. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 20. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bagian Umum)</b> 21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10 <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 23. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	11 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum)</b> 25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 29. Penyediaan Bahan/Material 30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12 <b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 31. Pengadaan Mebel 32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	13 <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 34. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14 <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 39. Pemeliharaan Mebel 40. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15 <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> 42. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	43. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
16	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b> 46. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 47. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
17	<b>Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)</b> 48. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 49. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
18	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Prokopim)</b> 51. Fasilitasi Keprotokolan 52. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 53. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengampu misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk mewujudkan visi misi tersebut maka dituangkan dalam suatu Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan pihak terkait yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Selain berisi program dan kegiatan, Rencana Kerja juga berisi pendanaan yang diterjemahkan dalam pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

### A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maka Sekretariat Daerah mempunyai beberapa program kegiatan meliputi :

**Tabel 4.1**  
**Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2025**

No	Program	Indikator Program	Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	86,00 Nilai	35.281.784.505
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,29 Nilai	23.167.393.000
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91,00%	1.645.583.000
	<b>Jumlah</b>			<b>60.094.760.505</b>

### B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Kebumen**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET 2025</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			<b>60.094.760.505</b>
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>60.094.760.505</b>
<b>1.</b>	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai IKM Setda</b>	<b>86 Nilai</b>	<b>35.281.784.505</b>
	<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>24.053.067.505</b>
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	161 orang/bulan	23.860.614.505
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	192.453.000
	<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>278.000.000</b>
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7 dokumen	28.000.000
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Praturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	1600 orang	250.000.000

			undangan		
	<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Perangkat Umum Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>2.396.098.000</b>
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	100.000.000
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	1.242.098.000
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	50.000.000
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	20.000.000
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 paket	34.000.000
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 laporan	950.000.000
	<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>64 unit</b>	<b>575.000.000</b>
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	62.000.000
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	453.000.000
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	60.000.000
	<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>2.799.599.000</b>

		<b>Pemerintahan Daerah</b>			
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	8.000.000
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.200.000.000
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	57.603.000
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.533.996.000
	<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>127 unit</b>	<b>2.369.040.000</b>
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	109 unit	942.000.000
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 unit	124.720.000
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	64.720.000
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	1.237.600.000
	<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>1.142.194.000</b>

4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang/bulan	302.394.000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	2 paket	200.000.000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	4.800.000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	7 orang/bulan	635.000.000
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>777.500.000</b>
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	587.500.000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	190.000.000
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>4 dokumen</b>	<b>319.000.000</b>
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 dokumen	100.000.000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	140.000.000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	79.000.000
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan</b>		<b>8 layanan</b>	<b>572.286.000</b>

		<b>Komunikasi Pimpinan</b>			
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	3 laporan	369.984.000
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 laporan	139.599.000
	4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	3 laporan	62.703.000
<b>2.</b>	<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</b>	<b>3,29 Nilai</b>	<b>23.167.393.000</b>
	<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>3 kegiatan</b>	<b>424.059.000</b>
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	1 dokumen	69.440.000
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 dokumen	68.845.000
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 dokumen	285.774.000
	<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>15 kegiatan</b>	<b>22.232.261.000</b>
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	5 dokumen	19.323.661.000
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan	7 dokumen	585.000.000

			perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB		
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	4 dokumen	2.323.600.000
	<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>3 kegiatan</b>	<b>458.972.000</b>
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	550 dokumen	80.000.000
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	12 kasus	286.057.000
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	626 dokumen	92.915.000
	<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>52.101.000</b>
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	5 dokumen	52.101.000
<b>3.</b>	<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan</b>	<b>91,00%</b>	<b>1.645.583.000</b>
	<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>175.480.000</b>

		<b>Perekonomian</b>			
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	121.880.000
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	1 laporan	53.600.000
	<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>195.340.000</b>
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 laporan	55.875.000
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 laporan	139.465.000
	<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>10 dokumen</b>	<b>919.000.000</b>
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2 dokumen	560.000.000
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1 dokumen	63.000.000
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	1000 orang	296.000.000
	<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>4 dokumen</b>	<b>355.763.000</b>
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi	1 dokumen	336.854.000

		Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja		
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1 dokumen	5.358.000
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	1 dokumen	13.551.000

## BAB V PENUTUP

Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan, dalam arti bahwa kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan capaian kinerja. Hal ini didukung oleh dokumen perencanaan ini ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-proses pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan tetap memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Renstra Sekretariat Daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang salah satunya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Setda Kabupaten Kebumen.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tertuang dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 11 Juli 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen,

**Edi Rianto, S.T., M.T**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701101 199803 1 006

TELAPAN DAN PERIKSAAN OLEH TIM BAPFEDA	
REVISI	TANDA TANGG
0	
1	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				161 Orang/bulan	23.860.614.505,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		175.290.509.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	192.453.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		174.837.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			12 Bulan	278.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	460.928.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				7 Dokumen	28.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		210.928.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	1.242.098.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		49.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		16.392.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	34.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		32.782.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	950.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		327.819.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	453.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		64.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		81.956.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		764.909.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	57.603.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		50.503.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.533.996.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		535.437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			127 Unit	2.369.040.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	1.219.784.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				109 Unit	942.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		355.137.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				4 Unit	124.720.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		32.782.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	64.720.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		17.782.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	1.237.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		814.083.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	-			12 Bulan	1.142.194.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	1.121.096.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	302.394.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		211.823.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		151.273.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				8 Orang	4.800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	587.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		418.924.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	190.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		214.861.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi</i>	-			4 Dokumen	319.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	611.931.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		220.732.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	140.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		220.732.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	79.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		170.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				2 Laporan	139.599.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		157.896.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				3 Laporan	62.703.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		254.965.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</i>	-			3,29 nilai	23.167.393.000,00						-	27.865.787.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	-			3 Kegiatan	424.059.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	570.843.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	69.440.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		181.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				2 Dokumen	68.845.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		138.778.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				2 Dokumen	285.774.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		250.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	-			15 Kegiatan	22.232.261.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	26.475.183.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				5 Dokumen	19.323.661.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>				7 Dokumen	585.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		628.319.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				4 Dokumen	2.323.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		846.864.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	-			3 Kegiatan	458.972.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	759.660.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				550 Dokumen	80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		106.199.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				12 Kasus	286.057.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		440.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				626 Dokumen	92.915.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		212.941.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah dokumen kerjasama daerah</i>	-			5 Dokumen	52.101.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	60.101.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				5 Dokumen	52.101.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		60.101.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan</i>	-			91,00 %	1.645.583.000,00						-	3.381.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian</i>	-			3 Dokumen	175.480.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	566.214.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				2 Dokumen	121.880.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		395.228.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	53.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		170.986.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan</i>	-			2 Dokumen	195.340.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	437.092.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				12 Laporan	55.875.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		207.619.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				12 Laporan	139.465.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		229.473.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan melalui SPSE</i>	-			10 Dokumen	919.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	1.916.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				2 Dokumen	560.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		1.539.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	63.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		188.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1000 Orang	296.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		188.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	-			4 Dokumen	355.763.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah	-	462.154.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				1 Dokumen	336.854.000,00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		396.589.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				1 Dokumen	5.358.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		10.928.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>				1 Dokumen	13.551.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah		54.637.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kab.Kebumen EDI RIANTO, ST., MT.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 27 Februari 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Gedung A Komplek Setda Kab.Kebumen

Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 27 Februari 2024

Pimpinan Sidang

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

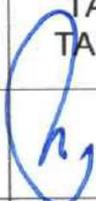
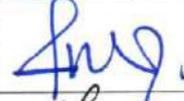
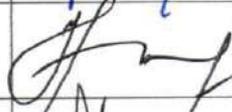


**EDI RIANTO, ST., MT.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.197011011998031006

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.	Unsur Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Kebumen	
2.	Bahrin Munawir, S.STP., M.Si	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Kebumen	
3.	Karyanto, S.H., M.M.	Unsur Kecamatan	Kecamatan Kebumen	
4.	Yulianto, S.Kom., M.Kom	Unsur Lembaga	Universitas Putra Bangsa	
5.	Firsty Candra N	Unsur Masyarakat/ LSM	KPA Kabupaten Kebumen	

DELEGASI OPD SETDA PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Zein Mustain, S.E., M.M., PFM	PDAM	PDAM Kab. Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 23 Februari 2024

Nomor : 005 / 9314  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen  
4. Terlampir  
di  
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Selasa / 27 Februari 2024  
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
tempat : Ruang Rapat Gedung A Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen  
acara : Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025  
keterangan : 1. Kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen untuk menjadi Narasumber;  
2. Kepada para Kepala Bagian agar mengikutsertakan 1 (satu) orang PPTK.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto, ST, MT.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197011011998031006

## TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
12.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
16.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
17.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
18.	Camat Kebumen
19.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
20.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
21.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
22.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
23.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
24.	Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
25.	Ketua Baznas Kabupaten Kebumen
26.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen
27.	Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Kebumen
28.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen
29.	Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong
30.	Ketua LSM Formasi Kabupaten Kebumen
31.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 23 Februari 2024

Nomor : 005 / 9312  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan sebagai Narasumber

Yth 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
4. Terlampir  
di  
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Selasa / 27 Februari 2024  
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
tempat : Ruang Rapat Gedung A Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen  
acara : Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025  
keterangan : Mohon berkenan hadir sebagai Narasumber

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen



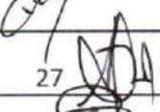
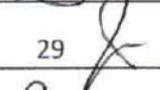
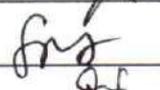
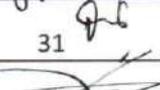
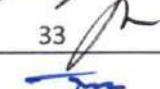
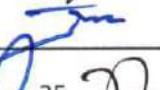
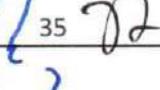
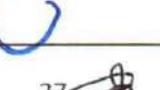
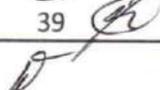
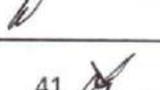
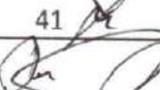
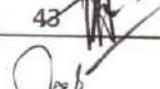
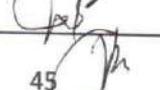
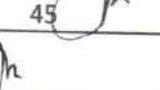
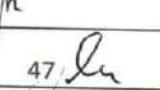
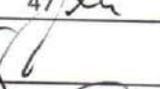
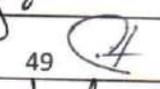
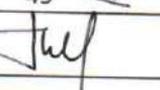
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto, ST, MT.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197011011998031006

## DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Selasa, 27 Februari 2024 ✓  
 TEMPAT : Ruang Rapat Gedung A Setda Kebumen ✓  
 PUKUL : Pukul 09.00 WIB - selesai ✓  
 ACARA : Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Kebumen  
 Tahun Anggaran 2024 ✓

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP	TANDA TANGAN
1	2	3	4		6
1	Eli Ricato	Sesda			1
2	MUM AZIFIK	Madu 3			2
3	Franz Haido	Asisten 2	Kebumen		3
4	peji Lerbali	Kabang am			4
5	PARSIONO	BAG UMUM	Setda		5
6	BATHUN MUNTAM	PARPAMA	Kb	08152700747	6
7	Hanzis	BPKPD	Kbun		7
8	Rusta	BKPSDM	KGM		8
9	Iswanto	Bas. KERA			9
10	Karyanto	camat	Kebumen	08152701719	10
11	Siti Durohbi Y	Bag PBB	Kebumen	081572901932	11
12	PURABWATI	Bag PSDA	Kebumen	08213820423	12
13	Mulyo Widodo	BPS		08136014131	13
14	Tubagus Purno A	Forum anak kat			14
15	Walangs	Bag - Pemenintah			15
16	Dewi	Prokopim			16
17	ALWI	BAG UMUM			17
18	Panji	Bag KUSA			18
19	Yogo S	Bag Og			19
20	Panji	Bag. KESRA			20
21	Elu Yudianto	Bag. PSDA			21
22	Wahyu P	pemerintah			22
23	Yulianto	Unit Putra Bangsa		0878483422	23
24	Rendi	BANMAS	Kebun.		24
25	Firsty Candra M	KPA Kebumen	Kebumen.	081391525838	25

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP	TANDA TANGAN
1	2	3	4		6
26	Saptri	BAZNAS		08822952293	26 
27	A. Harun	Bag Hukum			27 
28	Eka R	Bawaslu		08520033936	28 
29	Rane	Bag AS		08531161163	29 
30	Sangod	- II			30 
31	Dwi April	Bus. Hukum			31 
32	Moh. Anwar	ATA/BPM		08522606048	32 
33	Jabot Lela	PMI		08122620399	33 
34	Zain Mustain	PDAM			34 
35	Willy	PM			35 
36	Am R	PM			36 
37	Eti Rochana	Forman		08213811779	37 
38	KANANG SURYANA	BAPPEDA			38 
39	MUR H.	PROFOPIM			39 
40	WINDI K.T	"			40 
41	YUANISA	"			41 
42	Sunaryo	Bag. Umum			42 
43	Rafayul HS	- -			43 
44	Dwi Ashuti	- -			44 
45	Subroto	- -			45 
46	Guranso	- -			46 
47	Kusriyanti	- -			47 
48	Suripam	- -			48 
49	Agus Tjalsjorn	- -			49 
50	Destiani NA	- -			50 





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311  
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,  
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

---

**NOTULEN**

- Sidang/Rapat : Forum OPD 2024 Setda Kabupaten Kebumen  
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024  
Surat Undangan : Terlampir  
Waktu Sidang/Rapat : Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Acara : 1. Forum OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024  
2. Pembahasan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025
- Pimpinan Sidang/Rapat  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
Sekretaris : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen  
Pencatat : Kepala Sub Bagian Keuangan  
Peserta Sidang/Rapat : 1. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kebumen  
2. Para PPTK di Lingkungan Setda Kabupaten Kebumen  
3. Komisi A DPRD, Beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perwakilan Camat, Kepala BPS Kabupaten Kebumen, Kepala BPN ATR, Kepala KPU, Kepala Bawaslu, Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa, Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen, PDAM Kabupaten Kebumen, PMI Kabupaten Kebumen, KPA Kabupaten Kebumen, Ketua Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen (sebagaimana daftar hadir terlampir)
- Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Pembukaan dan pembacaan tata tertib Forum OPD  
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen  
3. Pembacaan Do'a  
4. Laporan Penyelenggara oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen  
5. Sambutan  
Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Bapak Edi Rianto, S.T., M.T  
- Bahwa tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif  
- Bahwa fungsi Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
  - d. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
  - e. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
  - f. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
  - g. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
  - Mekanisme koordinasi bagian di Sekretariat Daerah ada 3, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum
  - Evaluasi kinerja untuk tahun 2023, capaian fisik 98,95% dan keuangan 96,69%. Dimana ada beberapa kegiatan yang belum tercapai diantaranya karena faktor eksternal terkait bansos dan hibah di Bagian Kesra
  - Capaian Indikator Kinerja Utama mencapai 108,56%, sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dari target 83 tercapai 90,14%
6. Paparan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah :
- Capaian kinerja Setda di bawah koordinator Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdapat beberapa yang masih di bawah seperti Tingkat Kemiskinan dengan capaian 97,8%, Harapan Lama Sekolah 98,02%, dan Indeks Pembangunan Gender 99,9%
  - Capaian kinerja Setda di bawah koordinator Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pada

tingkat pengangguran terbuka dimana BPS belum merilis

- Capaian kinerja Setda di bawah koordinator Asisten Administrasi Umum, untuk nilai SAKIP masih rendah 95,8% diantaranya karena integrasi program

7. Paparan dari BAPPEDA (sebagai narasumber) :  
(Diwakili oleh Kepala BAPPEDA Bapak Bahrun Munawir, S.STP., M.Si)  
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen 16,34%, terdapat penurunan sebesar 0,07. Sesuai kajian harus main strategi teori kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, bukan memperbanyak program. Bagaimana cara menempatkan sasaran untuk mengurangi jaring-jaring kemiskinan dan hasil evaluasi yang harus ditangani yaitu konsumsi protein.
8. Paparan Inspektorat (sebagai narasumber)  
(Disampaikan oleh Inspektur Bapak Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H)  
Bidang perencanaan penganggaran, inspektorat mereview rancangan akhir RKPD, melihat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD. Bahwa RKPD 2024 sudah sesuai dengan visi misi apa yang tercantum di RPJMD. Untuk bagian-bagian di Setda untuk mengoptimalisasikan sesuai SOP Asisten. Rekomendasi dari SAKIP belum tercapai di aspek perencanaan program.
9. Masukan dari peserta :
  - a. Forum Anak oleh Tubagus  
Tentang aspirasi dari anak yang ada di Kebumen (SD, SMP, SMA) tentang jalan dan alun-alun. Permohonan sarpras olahraga di alun-alun diadakan kembali dan expo untuk tahun depan diadakan kembali.
  - b. Universitas Putra Bangsa oleh Bapak Yulianto, S.Kom., M.Kom  
Tentang kemiskinan di Kabupaten Kebumen, faktor penyebabnya dari non fisik, integritaskan berdasarkan indikatornya, validasikan berdasarkan faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan miskin, membuat program sederhana seperti kebun RT, dari UPB akan melakukan inovasi berupa pendampingan masyarakat.
  - c. Komisi Penanggulangan AIDS  
KPA dalam hal kemiskinan melakukan pendampingan dibantu BAZNAS mendistribusikan sembako yang dalam hal ini kurang dan mendampingi 12 anak dari ibu yang

terkena HIV berupa susu formula yang baru tercover 2 kg per bulan.

d. BAZNAS

Program yang dilakukan berupa modal alat kerja, pelatihan keterampilan, bantuan sembako. Untuk keterampilan bekerjasama dengan Disnaker berupa modal usaha ternak ayam yang diberikan alat mesin penetas.

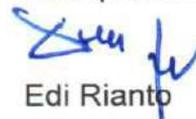
e. BPS

BPS telah melakukan pendataan penduduk tiap tahun, indikator kemiskinan berupa kebutuhan minimal masyarakat untuk bertahan hidup.

Kesimpulan :

Saran masukan dari peserta Forum OPD Setda Kabupaten Kebumen 2024 tersebut di atas dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan dibawa oleh delegasi perwakilan Setda Kabupaten Kebumen pada Musrenbang

Notulis,  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen



Edi Rianto

DOKUMENTASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024



1. PEMAPARAN OLEH PIMPINAN SIDANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



2. PEMAPARAN OLEH NARASUMBER





**3. PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH**





#### 4. DISKUSI





5. PENANDATANGANAN BERITA ACARA





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**JL. MERDEKA NO. 2 TELP (0287) 381144, 381410, 381205**